

BAB III

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROPINSI NTT

Sebagai salah satu propinsi yang terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pemerintah Propinsi NTT termasuk daerah tingkat propinsi yang berupaya untuk memperbaiki kinerja perekonomian terutama dalam rangka untuk menciptakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi regional. Sejak diberlakukan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT mulai diefektifkan untuk menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peran fiskal selama masa desentralisasi ini juga diorientasikan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

3.1. Kondisi Wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah propinsi ke-24 di Indonesia yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 47.349,9 km² atau 2,49% dari luas Indonesia. Propinsi NTT termasuk propinsi dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau di mana sebanyak 246 di antaranya telah memiliki nama (BPS Propinsi NTT, 2005). Di antara 246 pulau yang telah memiliki nama tersebut, terdapat 4 pulau besar, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Alor. Propinsi yang beribukota di Kota Kupang ini memiliki posisi astronomis, yaitu antara 8° - 12° Lintang Selatan dan antara 118° - 125 Bujur Timur. Secara geografis, Propinsi NTT berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Utara dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan, sedangkan di sebelah

barat berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Negara Timor Leste di sebelah Timur.

Keseluruhan wilayah di Propinsi NTT memiliki iklim kering yang dipengaruhi oleh angin musim. Musim kemarau memiliki periode yang lebih panjang, yaitu selama 7 bulan dari bulan Desember hingga April. Keadaan topografi di daerah ini banyak didominasi oleh daerah yang berbukit-bukit yang terdapat di semua daerah Kabupaten. Keadaan topografi seperti menyebabkan hampir sebagian besar pemukiman penduduk berada di bukit-bukit. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat terkonsentrasi di sektor pertanian di mana sektor pertanian yang dijalankan secara tradisional. Keadaan topografi yang berbukit-bukit ini juga menyebabkan sebagian besar masyarakat bercocok tanam di daerah perbukitan.

Secara administratif, Propinsi NTT terdiri atas 16 daerah kabupaten dan 1 daerah Kota. Dari kondisi administratif daerah, jumlah penduduk di Propinsi NTT pada tahun 2005 mencapai 4.127.000 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 87 jiwa/km². Hampir sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di Kota Kupang. Walaupun, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengurangi konsentrasi perekonomian di Kota Kupang, rendahnya kesiapan di daerah kabupaten menyebabkan masih diperlukannya pemusatan aktivitas perekonomian di Kota Kupang.

Sektor pertanian hingga pelaksanaan desentralisasi fiskal masih merupakan potensi ekonomi yang paling penting di Propinsi NTT. Komoditi yang menjadi andalan dalam ekspor non-migas adalah kopi, ikan tuna, ikan cakalang, ikan ekor kuning, kacang mete, kakao, dan vanili. Bidang perikanan yang juga memiliki potensi penting adalah ikan kerapu, ikan teripang, dan budidaya mutiara dan rumput laut. Hasil hutan yang dapat diperdagangkan adalah kemiri. Sebagian investor menanamkan modalnya di sektor pertanian yang selanjutnya menjadikan Propinsi NTT menjadi salah satu dari tujuan utama investasi. Berdasarkan aspek geologi, Propinsi NTT memiliki sumberdaya mineral yang cukup potensial seperti emas, tembaga, mangan, besi, nikel, timah, andesit, batu apung, batu gamping, dan batu marmer. Namun, sumberdaya mineral ini masih belum dimanfaatkan secara optimal.

3.2. Struktur Perekonomian Secara Umum

Perekonomian di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didominasi oleh aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Hasil-hasil sektor pertanian tidak hanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan daerah, akan tetapi telah berorientasi ekspor seperti hasil pada subsektor perkebunan dan perikanan. Rendahnya taraf kesejahteraan di daerah ini dikarenakan hampir sebagian besar aktivitas yang berbasis pada sektor pertanian masih dikerjakan dengan cara tradisional. Sektor-sektor lainnya di Propinsi NTT yang juga memberikan kontribusi potensial bagi PDRB Propinsi NTT adalah sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 3.1
Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional
Bruto di Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2001-2004
 (%)

Sektor Ekonomi	2001	2002	2003	2004
Pertanian	44,33	43,86	43,11	42,58
Pertambangan dan Penggalian	1,51	1,47	1,44	1,39
Industri Pengolahan	1,64	1,63	1,64	1,63
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,42	0,41	0,40	0,40
Bangunan	7,60	7,40	7,21	6,98
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,75	14,99	15,09	15,10
Pengangkutan dan Komunikasi	5,98	6,03	6,19	6,41
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,97	2,92	2,88	2,97
Jasa-jasa	20,80	21,29	22,05	22,52
PDRB^{*)}	8.221.573,16	8.622.490,95	9.016.717,28	9.446.769,84

Sumber: Propinsi Bali dalam Angka (BPS Propinsi Bali, 2001-2004)

Keterangan:

*) Berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 (juta Rupiah).

Kontribusi sektor pertanian di Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT mencapai lebih dari 40% dari tahun 2001 hingga 2004 (lihat Tabel 3.2). Kontribusi sektor pertanian ini terutama berasal dari subsektor tanaman perkebunan dan subsektor perikanan di mana komoditi kedua subsektor tersebut telah diorientasikan sebagai komoditi ekspor non-migas. Untuk sub sektor tanaman pangan masih diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kontribusi sektor jasa-jasa di Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT yang ditunjukkan di atas 20% berasal dari aktivitas di bidang pariwisata. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Propinsi NTT tidak hanya disumbangkan dari bidang pariwisata, akan tetapi juga berasal dari aktivitas perdagangan antar

daerah. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Propinsi NTT berdasarkan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Propinsi NTT
Tahun 1990-2007

Tahun	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha		
	Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Harga Konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1990	2.180.541,96	5.711.127,75	9.36
1991	1.584.893,13	4.847.599,29	6.77
1992	1.827.265,22	5.222.318,72	7.73
1993	2.180.541,96	5.711.127,75	8.85
1994	2.528.273,42	6.216.562,55	7.02
1995	2.942.460,89	6.767.350,00	4.57
1996	3.416.787,35	7.323.626,17	5.62
1997	3.887.050,11	7.735.213,96	8.22
1998	6.004.219,72	7.349.226,78	-4.99
1999	6.825.012,07	7.549.828,35	2.73
2000	7.849.987,50	7.849.987,50	4.88
2001	9.235.799,33	8.221.291,91	3.98
2002	10.632.878,00	8.622.490,95	4.73
2003	11.725.007,26	9.016.717,28	8.86
2004	13.301.366,16	9.446.769,83	3.42
2005	14.853.564,70	9.769.547,62	4.77
2006	17.917.123,91	10.266.159,40	5.08
2007	20.787.543,19	10.771.254,44	4.92

Sumber: Statistik PDRB Propinsi di Indonesia (BPS, 1990-2007)

3.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Sebagai salah satu wilayah yang struktur perekonomiannya lebih banyak didominasi di sektor pertanian, pola pertumbuhan perekonomian di Propinsi NTT memiliki kecenderungan untuk berfluktuasi. Pola perubahan perekonomian atau fluktuasinya juga ditentukan oleh taraf kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2007, Propinsi NTT masih berada dalam kondisi pengembangan daerah di mana aktivitas perekonomian lebih banyak dikonsentrasikan pada perbaikan infrastruktur.

Pada Tabel 3.2, pertumbuhan PDRB Propinsi NTT berdasarkan harga konstan relatif berfluktuasi dari tahun 1990 hingga 2007. Pada tahun 1990, PDRB di Propinsi NTT meningkat cukup tinggi, bahkan termasuk paling tinggi sejak tahun sebelumnya, yaitu 9,36% (lihat Tabel 3.2). Setelah mencapai angka pertumbuhan tertinggi, pertumbuhan PDRB Propinsi NTT terus berkurang hingga pada tahun 1998 justru mengalami penurunan sebesar 4,99%. Penurunan PDRB Propinsi NTT berdasarkan harga konstan ini merupakan dampak dari krisis ekonomi nasional yang berimbas ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2005 atau setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, angka pertumbuhan PDRB Propinsi NTT masih di bawah 5%. Sekalipun pada tahun 2006 dapat dinaikkan menjadi 5,08%, akan tetapi pada tahun 2007 angka kenaikan PDRB tersebut menurun menjadi 4,92%.

3.4. Sektor Perdagangan Internasional

Sebagaimana yang kebanyakan dilakukan oleh daerah tingkat propinsi lainnya di Indonesia, Propinsi NTT pun melakukan sejumlah aktivitas perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Ekspor dilakukan untuk sejumlah komoditi-komoditi unggulan di sektor pertanian maupun kerajinan, sementara untuk impor dilakukan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun bahan baku produksi. Keuntungan yang diterima dari kedua aktivitas perekonomian internasional tersebut berupa surplus yang selanjutnya dapat dialokasikan sebagai pendapatan masyarakat maupun sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

Sejak pertama kali pemerintah pusat mengkonsep pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional pada tahun 1990, sejak itu pula perdagangan internasional sudah terjadi di Propinsi NTT. Selama dekade 1990, hasil dari perdagangan internasional berupa surplus neraca perdagangan sudah mulai dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat maupun pemerintah di Propinsi NTT. Selisih tersebut dinyatakan sebagai tingkat keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT yang menyatakan selisih nilai barang dan jasa yang masuk maupun barang dan jasa yang keluar dari Propinsi NTT. Adapun mengenai tingkat keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Tingkat Keterbukaan Perekonomian di Propinsi NTT Tahun 1990-2007

Tahun	Tingkat Keterbukaan Perekonomian Propinsi NTT		
	Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Harga Konstan tahun 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1990	584.224,35	1.890.745.61	4.16
1991	732.360,93	2.240.020.03	4.62
1992	839.117,97	2.398.196.72	4.59
1993	993.005,94	2.600.813.89	4.55
1994	1.231.626,29	3.028.344.09	4.87
1995	1.478.857,73	3.401.216.96	5.02
1996	1.798.757,31	3.855.500.72	5.26
1997	2.446.142,41	4.867.813.46	6.29
1998	3.857.899,43	4.722.108,63	6.42
1999	2.677.214,18	2.961.534,32	3.92
2000	3.644.790,91	3.644.790,91	4.69
2001	5.814.749,05	5.176.027,28	6.29
2002	7.814.971,53	6.359.268,73	7.37
2003	9.719.467,57	7.474.425,09	8.28
2004	11.753.907,16	8.347.748,21	9.25
2005	14.342.637,11	9.433.498,23	9.65
2006	18.308.654,63	10.490.498,80	10.21
2007	22.049.252,32	11.425.020,49	10.6

Sumber: Statistik Ekspor dan Impor Propinsi di Indonesia (BPS, 1990-2007)

Keterangan:

Dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Pada tabel 3.3, tingkat keterbukaan perekonomian pada tahun 1990, nilainya sebesar Rp 1.890.745.61 juta dengan pertumbuhan sebesar 4.16%. Pada tahun 1995, nilai surplus dari keterbukaan perekonomian sempat mengalami kenaikan sebesar 5.02% akan tetapi hingga surplus keterbukaan perekonomian masih dinikmati oleh masyarakat di Propinsi NTT hingga tahun 1998. Defisit dari nilai ekspor dan impor mulai terjadi pada tahun 1999 di mana nilai realisasi total ekspor dan impor berdasarkan harga konstan turun sebesar 3.92%. Pada tahun 2000 terjadi kenaikan hingga 2007, masih terjadi surplus dalam aktivitas keterbukaan perekonomian.